

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TANAH PUTIH KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh :

DEPI LISPA SUMANTI^{1*}

E:1012131054

Sri Haryaningsih², Dewi Utami²

Email : e1012131054@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Minimnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013. 2. Sumber daya manusia tidak berdasarkan lulusan. 3. Tenaga pendidik masih mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013. 4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar belum memadai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Agustino, 154:2017), tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Organisasi. Kesimpulannya dari keseluruhan seluruh tenaga pendidik telah menjalankan tugasnya masing-masing akan tetapi ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan oleh implementor tersebut. Ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan proses pengorganisasian.tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri. 2) Interpretasi . kesimpulannya tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu tenaga pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum yang baru. dan 3) Aplikasi/penerapan. Kesimpulannya masih kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, dalam pelaksanaannya serta sarana prasarana penunjang sosialisasi yang masih kurang. Sedangkan dari segi tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu tenaga pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum 2013. Saran untuk hasil penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi untuk menambah pengetahuan tentang standar pelayanan minimal pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; standar pelayanan minimal; kurikulum 2013.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan Negara. Kualitas SDM bergantung pada kualitas pendidikan dan peran pendidik untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terbuka dan demokratis. Oleh sebab itu, komponen dari sistem pendidikan nasional harus senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan nasional adalah kurikulum. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar telah menjelaskan bagaimana kriteria Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik) yang memenuhi syarat dalam memberikan pelayanan minimal pendidikan dasar.

Kurikulum menurut UU No.20 Tahun 2003 telah menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional, didalamnya mencakup rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Senada dengan hal itu, Nana Sudjana (2006), juga mengemukakan bahwa Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan kedalam bentuk

Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat didalam proses tersebut yakni pendidik dan peserta didik. Hal ini berarti kurikulum merupakan suatu hal yang penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan serangkaian proses pembelajaran. Beberapa penjelasan diatas tentang kurikulum, dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal pengembangan ide dan rancangan menjadi proses pembelajaran yang lebih relevan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang kita impikan selama ini.

Serangkaian persoalan pendidikan yang masih mengganjal dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah belum adanya sistem pembelajaran yang dinilai tepat untuk menjawab cita-cita pendidikan selama ini, hal ini dibuktikan dengan sederet pergantian Kurikulum yang dilakukan oleh Pemerintah dari tahun ke tahun. Kurikulum merupakan bidang yang sulit untuk dipahami, tetapi sangat terbuka untuk didiskusikan.

Perubahan kurikulum dalam pendidikan nasional Indonesia tercatat sejak tahun 1945 telah mengalami 10 kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006,

yang disusul dengan kurikulum terbaru yakni kurikulum 2013. Perubahan kurikulum bertujuan mengarah pada perbaikan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan perlu dilakukan karena adanya revitalisasi kurikulum. Kurikulum 2013 muncul sebagai kritikan kurikulum sebelumnya yakni KTSP 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan). Dalam perjalanannya upaya mengangkat citra dan martabat Bangsa Indonesia di mata dunia internasional, yang kini berada pada tingkat kurang menggembirakan, maka perlu adanya revitalisasi pendidikan dalam arti perubahan-perubahan sistem pendidikan secara fundamental dan kontekstual).

Kurikulum 2013 juga dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang telah dikeluarkan oleh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu bentuk landasan hukum tersebut adalah Permendikbud No. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar lebih memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Dalam hal ini juga para orangtua siswa dapat merasakan apa yang anak-anaknya rasakan, karena dengan penerapan kurikulum 2013 ini anak mereka harus belajar full time di sekolah.

Depi Lispa Sumanti.E1012131054
Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

Pada saat ini Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru merupakan pembahasan yang menarik untuk diperbincangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, Pada awal tahun ajaran 2013/2014, pemerintah secara resmi telah menerapkan kurikulum 2013 untuk di ujicoba di beberapa sekolah yang telah terakreditasi A dan B, Yaitu pada Sekolah Dasar kelas I,II,III,IV,V dan kelas VI, Tingkat Menengah Pertama (SMP/MTS) kelas VII,VIII, dan IX, serta Tingkat Menengah Atas (SMA / MA / SMK) kelas X, XI, dan XII. Eusabia Floreza.W (2014 : 3), juga mengemukakan bahwa Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru dalam dunia pendidikan menjadi penyempurna kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 berbasis KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).Beberapa yang menjadi landasan penyempurnaan kurikulum ini diantaranya, landasan yuridis, landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan empiris.Pertama secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dibidang pendidikan.

Dan yang terakhir adalah landasan empiris, secara kasat mata beberapa kurikulum sebelumnya masih terlalu menekankan pada konsep penguasaan teori belaka tanpa disertai praktik yang memadai, sehingga peserta didik terkesan begitu konseptual dalam berperilaku. Kurikulum 2013 hadir untuk menanggulangi

hal tersebut dengan harapan orientasi kurikulum yang tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga Negara untuk berperanserta dalam membangun Negara pada masa yang akan datang.

Penyempurnaan ini, dilaksanakan guna meningkatkan sistem pendidikan nasional agar selalu relevan dan kompetitif. Selain itu, juga diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam hal ini, sekolah harus mengupayakan keberhasilan implementasi kurikulum 2013, melalui berbagai program pengembangan yang dilakukan. Pengembangan fasilitas dan penguatan manajemen sekolah perlu dilakukan sehingga pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga perlu melakukan strategi penerapan Kurikulum dengan Sosialisasi dan pelatihan yang memadai agar kurikulum 2013 tidak hanya menjadi program yang sia-sia. Oleh sebab itu, lahirnya kebijakan baru ini, tentunya harus tetap disikapi dengan positif jangan sampai menjadi beban guru, siswa, serta satuan pendidikan yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap pendidikan.

Kondisi geografis memang tidak bisa di pungkiri dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program Pemerintah. Terkadang hal seperti ini yang membuat pembangunan tidak

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

merata di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk dalam pembangunan sarana pendidikan yang memadai. Dalam praobservasi yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan beberapa hasil bahwa, pembelajaran dengan kurikulum 2013 sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat beberapa kendala seperti interpretasi, organisasi dan penerapan kebijakan Kurikulum 2013 yang tergolong cukup ideal dikarenakan ada dua komponen yang ingin dicapai sekaligus, yakni lulusan yang berkarakter dan berkompetensi. Sementara kondisi peserta didik di SDN 05 Tanah Putih belum mampu untuk mencapai dua hal tersebut dalam proses yang bersamaan karena daya tanggap peserta didik masih tergolong lambat dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), sehingga guru harus mengajar secara perlahan dari tiap materi.

Dari sisi sumberdaya, sarana belajar yang tersedia terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan dan belum memiliki LAB untuk penyimpanan alat-alat peraga serta praktikum. Di SDN 05 Tanah Putih mempunyai 7 orang Guru Kelas, 1 orang Kepala Sekolah, 1 orang Guru Penjaskes, 1 orang di bagian perpustakaan dan 1 orang dibagian tata usaha. 3 diantaranya yang memegang kelas masih berstatus sebagai guru honorer dan belum mengikuti banyak pelatihan kompetensi tenaga pendidik, serta status lulusan Sekolah Menengah Atas / SMA. Dalam pelaksanaan kurikulum ini, juga

terdapat beberapa organisasi yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.

Diantaranya SDN 05 Tanah Putih, Kantor Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pendidikan Kecamatan Kalis, Tim Pengawas tingkat sekolah dasar, serta komite sekolah. Oleh karena letak geografis SDN 05 Tanah Putih yang berada cukup jauh dari daerah perkotaan, menyebabkan seluruh agen pelaksana tersebut tidak bisa melakukan pengawasan langsung terhadap sekolah ini terutama dari pihak Dinas Pendidikan kabupaten. Begitupun pada saat sosialisasi kurikulum dan rapat kepala sekolah di dinas kabupaten, terkadang kepala sekolah dan kepala KUPT Pendidikan kecamatan Kalis mengalami keterlambatan selama beberapa kali karena jarak kecamatan Kalis yang cukup jauh dari dinas pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu sekolah yang terpilih untuk diterapkannya kebijakan tersebut, yakni SDN 05 Tanah Putih, dengan berfokus pada sisi implementasi kebijakan. Untuk itu dalam mengukur implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SDN 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, penulis menggunakan teori Charles O. Jones (1996) yang menggunakan tiga variable (interpretasi, organisasi dan penerapan) untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

tersebut dengan judul “Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu”.

2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang muncul akibat Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun identifikasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (tenaga pendidik) berdasarkan lulusan.
2. Kualitas sumber daya manusia tidak memenuhi kualitas dalam pelaksanaan kurikulum 2013.
3. Jumlah tenaga pendidik (guru) belum berdasarkan karakteristik.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti perlu memfokuskan penelitian agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas maka peneliti hanya memfokuskan pada masalah “faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah

Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian serta agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu?

5. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal.

6. Manfaat Penelitian

6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan pengkajian dan pengembangan ilmu, khususnya disiplin Ilmu Administrasi Publik.

6.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan/ masukan pemikiran secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topic kejadian, serta sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

Publik, Jurnal Ilmu Administrasi Publik
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publi>
peneliti yang ingin mengkaji permasalahan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 secara lebu mendalam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Sering kali kebijakan publik diartikan sama dengan pengertian keputusan. Sebenarnya kedua istilah ini berbeda. Perbedaan yang paling mudah ditangkap adalah mengenai luasnya cakupan dan arti pentingnya. Kebijakan publik (Nugroho 2013:4) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Pertanyaan pertama, kenapa berkenaan dengan “segala sesuatu”?karena kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antar warga dengan pemerintah. Pertanyaan kedua , kenapa istilah yang dipakai adalah “dikerjakan”? Oleh karena “kerja” sudah merangkum proses “pra” dan “pasca”, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan dinilai hasilnya. Istilah kerja adalah istilah yang bersifat aktif dan memaksa karena kata kuncinya adalah keputusan.Ketiga, kenapa “dikerjakan dan “tidak dikerjakan”?Karena “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan” sama-sama keputusan.Anda memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri dan tidak memilih bekerja sebagai pekerja partai adalah keputusan”.

James Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Agustino, 2012:7) memberikan definisi kebijakan publik yaitu “kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Menurut Thomas R. Dye (dalam Thoha, 2014:107) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak untuk dilakukan. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikutip Dye (dalam Subarsono, 2016:3) yang mengatakan bahwa hendaknya kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika dalam sosial yang ada dalam masyarakat.

Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan, akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan *civil society*. Merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik, sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampilkan interaksi antar ketiga aktor tersebut.

dikemukakan oleh Widodo (2016:43) dibedakan dalam tiga tahapan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi.

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi dalam Wibawa (2014:2).

Menurut Winarno (2012:53), Formulasi kebijakan sebagai suatu proses, dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan - keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) dalam studi kebijakan publik (*public policy study*) dalam Widodo (2016:111) salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu Mustofadijaja (2012:45).

Pertanyaannya adalah

fenomena apa yang dinilai. Jawabannya sangat tergantung kepada konteksnya. Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai menurut Mustofadijaja (2012:46) adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (*target groups*) yang ingin di pengaruhi, berbagai instrument kebijakan yang

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin Usman, 2009:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, implementasi yang melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, pada kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pembelajaran pengajaran guru di dalam kelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan institusi, seperti birokrasi terhadap pemerintahan di setiap provinsi, kota, dan desa.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan dalam Abdullah dalam Agustino (2012:11), yaitu :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip (dalam Solichin, 2015:65), mengatakan bahwa, yaitu: "implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Sementara menurut Winarno (2012), yang mengatakan bahwa : "Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya".

Sejatinya dalam pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Analisis dilakukan tanpa mempunyai presentase untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2012:31) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni:

1. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
2. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan

pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga – lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah (dalam Tahir,2014: 52) bahwa studi kebijakan publik dapat di pahami dari dua perspektif, yakni;

“Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya(resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.Kedua, perspektif administratif bahwa kebijakan publik merupakan ikhwil berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik(official officers) didalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik sehingga visi dan harapan yang di inginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas”.

Disisi lain Tachjan(dalam Tahir,2013:53) mengemukakan bahwa :

“implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi(birokrasi) dalam proses kebijakan publik dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.” Dunn (dalam Tahir,2013:53) memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut: *policy implementation is formulation, which is essentilly theoretical.*

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut karena ia terkait dengan tujuan di adakannya kebijakan(policy goals) Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan(power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Abdul wahab (dalam Tahir,2013:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan

lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Adapun Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori implementasi kebijakan publik model Charles O Jones, karena teori ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Charles O Jones (dalam Agustino,154 :2017) mengatakan dalam melaksanakan aktivitas imlementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yaitu :

- a. Organisasi : pembentukkan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat di terima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang di sesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (interpretation) dan penerapan (applications) dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

menetapkan dan menata kembali sumber daya unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijkan.

Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Betumpu pada apa yang dikemukakan oleh Jones diatas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi iniberkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut karena ia terkait dengan tujuan di adakannya kebijakan(policy goals) Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan(power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan disamping karakteristik lembaga dan rezim

serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Abdul wahab (dalam Tahir,2013:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstruktur /mengatur proses implementasinya.

Adapun Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori implementasi kebijakan publik model Charles O Jones, karena teori ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Charles O Jones (dalam Agustino,154 :2017) mengatakan dalam melaksanakan aktivitas imlementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yaitu :

- a. Organisasi : pembentukkan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat di terima serta dilaksanakan.

- c. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanannya pembayaran atau lainnya yang di sesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

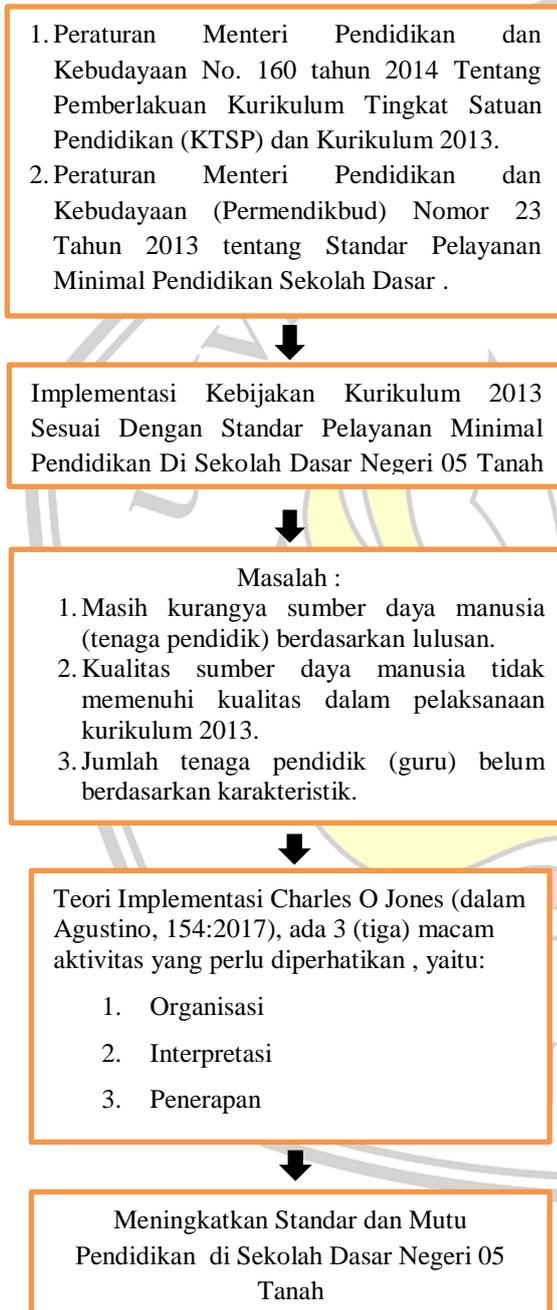
Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (interpretation) dan penerapaaan (applications) dapat dimaknai sebagai berikut.

Pertama, aktivitas pengorganisasian(organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Betumpu pada apa yang dikemukakan oleh Jones diatas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Dari teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones lebih tepat untuk menganalisis proses

Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

Kerangka Pikir



penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, karena dianggap cocok untuk membahas masalah Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini, serta masalah yang diangkat memerlukan pendalaman lebih tentang masalah yang ada menyangkut sosial budaya masyarakat maupun implementor dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan.

Metode penelitian menurut Ulber Silalahi (2010:12) “merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut”.

Penelitian deskriptif dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan suatu gejala dengan pola hubungan sebab-akibat. Penelitian deskriptif di jelaskan pula oleh Ulber Silalahi (2010:27) “penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang suatu situasi khusus, seting social, atau hubungan”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang terjadi di lapangan, serta dengan menggunakan metode purposive. Adapun teknik untuk menentukan subjek penelitian adalah dengan cara *Purposive* sampel atau pemilihan subjek yang

C. METODE PENELITIAN

Depi Lispa Sumanti.E1012131054
Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik agar memperoleh data yang lengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung objek yang diteliti serta mencatat hal-hal yang ditemukan dari lokasi penelitian yang diamati. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informen dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Ulber Silalahi mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur

Publik, Jurnal Ilmu Administrasi Publik <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publi> dan tak terstruktur, wawancara tatap muka dan telepon.

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara yaitu:

- Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan untuk mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada reponden (Ulber Silalahi, 2009, 313). Pewawancara mewakili sejumlah pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap responden dalam peristiwa yang sama.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh haruslah lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dokumentasi yaitu terjun langsung kelapangan dan mencari data mengenai objek-objek penelitian tersebut yang

berasal dari pihak lain berupa undang-undang, buku, surat kabar, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan lokasi penelitian dan masalah penelitian. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa data dalam bentuk gambar foto pada lampiran guna mendukung validitas dan kebenaran data yang diteliti. Pada penelitian sosial fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Beberapa contoh sumber data dari studi dokumentasi dapat berupa buku-buku tentang pendapat pribadi maupun organisasi, teori, hukum-hukum/dalil dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Budi Koestoro dan Basrowi (2006:143) membagi jenis sumber data dari studi dokumentasi terdiri atas:

- a. Catatan resmi (*official of formal record*), yaitu berupa landasan hukum, *data base*, keputusan organisasi, dan sebagainya.
- b. Dokumen-dokumen ekspresif (*expressive document*), yaitu berupa biografi, autobiografi, surat pribadi, dan buku harian.
- c. Laporan media massa (*mass media report*), yaitu berupa buletin, majalah, koran, dan selebaran.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur (buku)

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

mengenai konsep perilaku pemilih, dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peneliti memperoleh data dengan cara konvensional yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip dan selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan fokus bahasan masing-masing.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Organisasi

Sekolah berkerja sama dengan Komite Sekolah dibawah Dinas Pendidikan dibawah pemerintah daerah yang di pimpin oleh Bupati dibantu Unit Pelayanan Teknis Kecamatan yang berkerja diwilayah kecamatan. Memang tidak mudah menyelesaikan suatu urusan atau masalah dikerjakan oleh satu organisasi atau lembaga tanpa dibantu oleh organisasi lain.

2. Interpretasi

pencapaian program dari suatu program atau kebijakan maka terlebih dahulu harus dilihat bagaimana proses-proses kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses implementasi program penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan dasar diketahui masih ada kendala-kendala yang ditemukan dalam setiap proses implementasi. Guru-guru Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih mampu menjelaskan kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar ini kepada target yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Publik, Jurnal Ilmu Administrasi Publik
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publi>
standar minimal pendidikan dasaka
Akibatnya sampai saat ini pegawai tidak
memiliki pedoman, petunjuk dan referensi
untuk mereka bekerja.

Aspek selanjutnya yaitu penetapan
manajemen pelaksana kebijakan, kerja
sama setiap personil atau sangat
dibutuhkan. Walaupun setiap pegawai
mempunyai tugas pokok dan fungsinya
masing-masing sesuai struktur organisasi
yang telah ditetapkan akan tetapi
kerjasama sangat mempengaruhi kinerja
pegawai tersebut. Sehingga pada proses
bekerja tidak terjadi miskomunikasi dan
saling tumpang tindih dalam pekerjaan.

Aspek yang terakhir yaitu
penetapan jadwal kegiatan. Dalam
menentukan jadwal kegiatan, tidak ada
jadwal kegiatan proses implementasi yang
kongkrit melainkan setiap ada
pemberitahuan dari pemerintah mengenai
Permendikbud No. 23 Tahun 2013, oleh
Dinas Pendidikan langsung di sampaikan
ke UPT Kecamatan dan selanjutnya
disampaikan ke Sekolah - sekolah untuk
diterapkan.

Dilihat dari keseluruhan seluruh
personil telah menjalankan tugasnya
masing-masing akan tetapi ada beberapa
hal yang tidak bias dilakukan oleh
implementor tersebut. Ada beberapa
permasalahan yang tidak sesuai dengan
proses pengorganisasian. Tidak adanya

Sehingga dengan adanya interpretasi tersebut,
kebijakan standar pelayanan minimal
pendidikan dasar dapat dilaksanakan oleh
pelaku target kebijakan dan mereka mengerti
akan kebijakan tersebut.

3. Aplikasi / Terapan

upaya dalam penerapan kebijakan
kurikulum 2013 sudah ada, pihak sekolah
kami berkonsultasi dengan pihak UPT dalam
mencari solusi agar metode pembelajaran
berdasarkan kurikulum 2013 ini dapat
dilaksanakan dengan optimal. Untuk
kekurangan sarana dan prasarana untuk
memenuhi tema pembelajaran berdasarkan
kurikulum 2013, guru mencari inisiatif lain
dengan menggunakan origami, dan bahan
lainnya sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya maka dalam penulisan skripsi
yang berjudul Implementasi Kebijakan
Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar Negeri
05 Tanah Putih Kecamatan Kalis ini dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Organisasi

Berkaitan dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP), pemerintah
tidak memiliki standar operasional
prosedur (SOP) yang pasti dalam
melakukan proses implementasi tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri. Mengenai masalah penerimaan tenaga pendidik dan anggaran untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana. Yang pertama mengenai penerimaan atau perekrutan tenaga pendidik yang melakukan perekrutan yaitu pemerintah pusat, harus melalui izin pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan tidak mempunyai hak menentukan itu. Disisi lain mengenai penambahan sarana dan prasarana yang menentukan anggaran juga pemerintah. Disinilah bias dilihat kurang maksimalnya penerapan Permendikbud No.23 Tahun 2013 tersebut.

2. Interpretasi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar merupakan salah satu peraturan yang digunakan sebagai acuan agar bias diterapkan untuk menentukan kualitas pendidikan, menghilangkan kesenjangan antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah-sekolah yang ada dipedalaman diseluruh wilayah Indonesia. Untuk di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih dalam hal ini masih kurang dalam

Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik <http://jurnafis.untan.ac.id> menginterpretasikan kebijakan tersebut dengan baik, dengan tidak adanya langkah-langah komkrit dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan implementasi kebijakan.

Sesuai informasi di lapangan masih teradi ketidak sinkronan antara sekolah dengan pemerintah yang menangani pendidikan. Dimana dalam peraturan ini mengatur standar tenaga pendidik di semua sekolah terpenuhi sesuai standar kompetensi yang di butuhkan akan tetapi, disisi lain di Sekolah Dasar 05 Tanah Putih khususnya dalam tenaga pendidik belum bisa terpenuhi sesuai standar. Inilah salah satu factor di lapangan mengapa implementasi ini belum dilaksanakan dengan baik.

3. Aplikasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Unit Pelayanan Teknis Kecamatan Kalis telah mensosialisasikan tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar kepada Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih, walaupun pada dasarnya ada beberapa Guru yang belum mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Akan tetapi sudah ada upaya dari Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan

Kalis khususnya Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dari segi teknis yaitu masih kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, dalam pelaksanaannya serta sarana prasarana penunjang sosialisasi yang masih kurang. Sedangkan dari segi tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu tenaga pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih masih bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum yang baru. Sedangkan dalam segi sarana dan prasarana penunjang pendidikan mengapa masih belum terpenuhi sesuai standar karena itu berkenaan dengan anggaran Pemerintah. Baik dalam merekrut atau mengangkat tenaga pendidik dan memenuhi sarana dan prasarana semuanya itu berpengaruh dengan anggaran Pemerintah itu sendiri dan cara memenuhinya disesuaikan dengan berapa besar anggaran pendidikan yang dimiliki Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sesuai Standar

Depi Lispa Sumanti.E1012131054

Ilmu Administrasi Publik UniversitasTanjungpura

Pelayanan Minimal Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, adapun saran yang dapat peneliti berikan ialah :

Ada beberapa hasil kesimpulan yang peneliti dapatkan : Pertama organisasi, tidak adanya standar operasionalprosedur (SOP), tidak ada jadwal kegiatan dan target tertentu dalam pelaksanaan implementasi. Rendahnya kualitas tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih. Kedua interpretasi, dalam menginterpretasikan sudah baik Cuma dalam pelaksanaannya belum maksimal, tidak ada upaya penjabaran kongkrit dari peraturan atau kebijakan yang umum ini menjadi peraturan atau kebijakan teknis operasional, beberapa guru masih ada yang belum memahami isi dari peraturan ini. Yang Ketiga aplikasi, kurangnya peninjauan langsung kelapangan dari atasan dan hanya mengandalkan data-data yang masuk.

Dari hasil kesimpulan tersebut peneliti memberikan masukan diantaranya :

1. Organisasi, Kepala Sekolah hendaknya lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh stake holder untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih. Lebih aktif lagi membangun kerja sama dengan pihak luar dan meningkatkan keterlibatan warga sekolah, peran serta masyarakat, komite sekolah, pengawas sekolah dan Dinas Pendidik dan

Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih.

2. Interpretasi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menunjukkan perkembangan yang pesat, maka guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih hendaknya selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, meningkatkan kemampuan dan selalu mengkaji kembali program pembelajaran.
3. Aplikasi, untuk Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih dalam mengalokasikan dan anggaran harus lebih optimal dengan skala prioritas dalam pemenuhan Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Untuk tenaga pendidik (guru) selalu mengadakan inovasi, kreatif, professional, membagi waktu dan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan informasi (IT).

Untuk Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu harus lebih sering melakukan peninjauan langsung ke lapangan, dengan melihat langsung

Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik <http://jurmafis.untan.ac.id> kelengkapan dan dapat menentukan yang mana saja harus diutamakan dan yang mana saja harus didahulukan sehingga pemerataan dari segi sarana dan prasarana dapat dilakukan.

E. Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 2010. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Syahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Mustopadijaja. 2012. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Duta Pertiwi foundation.
- Muzamiroh Latifatul, Mida. 2013. *Kupas Tuntas Kurikulum 2013*. Kata Pena.
- Nugroho, Riant. 2013. *Kebijakan, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif : Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Prastowo, Andi 2015. *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu: Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Rusman (2012). *Model-Model Pembelajaran*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Satori, Djarm'an & Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ; Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung ; PT Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung : Alfabeta.
Tahir, Arifin. 2013. *Implementasi Kebijakan Transparansi*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
Thoha, Miftah. 2014.*Dinamika Ilmu Administrasi Publik*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Usman, Nurdin. 2009.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Semarang : CV Obor Pustaka.
Wibawa, Samodra. 2014.*Kebijakan Publik*. Jakarta : Intermedia

Widodo, Joko. 2016. *Analisa Kebijakan Publik*.Malang : Bayu Media Publishing.
Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

